

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan sebagai upaya pengurangan angka kemiskinan melalui penekanan angka terhadap kekerasan pada perempuan. Tugas tersebut menjadi kewajiban utama negara dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan yang responsif terhadap korban. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu pemenuhan hak korban. Ketika negara mulai melemah, maka peran masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menjadi penyeimbang, pengawas dan pendorong dalam menentukan suatu kebijakan serta pelaksanaannya.

Advokasi masyarakat sipil menjadi alat politik yang perlu dilakukan agar pemerintah terus memberikan perhatian melalui kebijakan untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan yang responsif gender. Salah satu advokasi masyarakat sipil dalam pemenuhan layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh LSM Sahabat Perempuan yang melihat kondisi korban yang belum mendapatkan layanan di Kabupaten Magelang. Melalui advokasi kebijakan yang dilakukan Sahabat Perempuan, maka hak yang dapat diperoleh korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang adalah akses untuk layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Magelang dan RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang. Selain itu tersedianya layanan *shelter* bagi

korban, layanan pendampingan rohani, advokasi untuk layanan bantuan hukum yang lebih bersepektif gender serta dorongan Sahabat Perempuan terhadap anggaran untuk korban kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Magelang. Advokasi dilakukan melalui *lobby*, *hearing*, audiensi, kampanye dan pendidikan publik serta komunikasi efektif kepada pemangku kebijakan hingga grassroots sebagai upaya pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang untuk mencapai kesejahteraan.

VI. 2. Saran

Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan untuk upaya mendesak adanya perubahan dalam pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan cukup baik. Akan tetapi advokasi yang dilakukan masih memiliki kelemahan. Dari segi pendataan untuk korban kekerasan terhadap perempuan yang ada di Magelang belum dapat terdata dengan baik. Belum adanya penelitian terkait dengan hal tersebut, sehingga mengakibatkan data yang di sampaikan kepada pembuat kebijakan dirasa masih kurang lengkap. Maka dari itu diperlukan peningkatan untuk pengemasan data seacara lebih baik lagi melalui penelitian dan kerjasama dengan universitas di Magelang serta *lobby* yang lebih kuat lagi kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu juga hubungan dengan jaringan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang lebih diperkuat lagi secara informal, sebab masukan-masukan kepada DPRD sangat diperlukan terkait untuk pembiayaan korban. Keterbukaan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan untuk menjalin hubungan kerjasama

yang lebih baik dan harmonis. Hal tersebut diperlukan agar memperingan kinerja pemerintah dengan adanya LSM Sahabat Perempuan yang turut membantu dalam menangani dan upaya pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Magelang.